Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis [JIMEIS]
Vol. 6, No. 4, Juli 2026, Hal. 489-497
ISSN: 2808-6686

PENGARUH PENGELOLAAN KEUANGAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) TERHADAP EFEKTIVITAS PROSES BELAJAR MENGAJAR DI SMP NEGERI 25 MEDAN

[1]Dea Sabrina G

[1]Program Studi Akuntansi, [1]Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara 20238)

[1]Email: deasabrina884@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pengelolaan keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap efektivitas proses belajar mengajar di SMP Negeri 25 Medan, yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif dengan metode kuantitatif, dengan sumber data primer melalui wawancara kepada kepala sekolah, bendahara BOS, guru, dan komite sekolah, serta data sekunder berupa dokumen RKAS dan laporan realisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan belum maksimal karena sosialisasi dari dinas pendidikan kurang dan sempat terjadi pergantian bendahara. Pelaksanaan sudah berjalan sesuai petunjuk teknis, tetapi keterlambatan penyaluran dana membuat realisasi tidak selalu tepat waktu. Pengawasan melemah pada pemberian honor guru honorer yang sering tertunda. Pertanggungjawaban sudah memenuhi kriteria karena laporan dibuat setiap tahap dan diserahkan melalui aplikasi ARKAS. Faktor pendukung utama adalah keterlibatan seluruh pemangku kepentingan sekolah, sedangkan penghambatnya adalah keterlambatan penyaluran dan minimnya sosialisasi. Upaya yang dilakukan sekolah adalah memprioritaskan kebutuhan proses belajar mengajar dan gaji guru agar dampak keterlambatan tidak meluas.

Kata Kunci: *Pengelolaan Keuangan, Dana BOS, Efektivitas Pembelajaran, Perencanaan, Pertanggungjawaban*

I. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan sarana utama untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia suatu bangsa. Bangsa yang maju selalu menempatkan pendidikan sebagai prioritas, dan pencapaiannya dapat dilihat dari kesesuaian antara tujuan dan keterlaksanaan pendidikan. Di Indonesia, Pasal 3 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 menegaskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, negara berkewajiban menyediakan layanan pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Salah satu bentuk kewajiban negara adalah meringankan biaya pendidikan melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program ini menyediakan dana untuk biaya operasional nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah. Sejak diluncurkan pada tahun 2005, BOS telah menjadi tulang punggung pembiayaan operasional sekolah negeri, terutama setelah kebijakan pendidikan gratis digulirkan. Namun, besarnya dana yang mengalir ke sekolah tidak otomatis menjamin pengelolaan yang baik. Pengelolaan keuangan sekolah memerlukan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang tertib, pengawasan yang ketat, dan pertanggungjawaban yang transparan.

Pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien menjadi prasyarat agar dana BOS benar benar memberi dampak pada proses belajar mengajar. Studi Dahrani et al. (2022) menegaskan bahwa model pengelolaan keuangan yang baik harus berbasis literasi keuangan dan inklusi keuangan, sehingga pengelola mampu mengambil keputusan yang tepat. Sejalan dengan itu, Gunawan et al. (2020) menemukan bahwa literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengelolaan keuangan. Temuan ini relevan bagi sekolah, karena bendahara dan kepala sekolah dituntut memiliki pemahaman yang memadai tentang regulasi, penyusunan anggaran, dan pelaporan.

SMP Negeri 25 Medan merupakan salah satu sekolah negeri yang sepenuhnya bergantung pada dana BOS. Sekolah ini memiliki 12 ruang kelas, satu ruang kantor, empat toilet, dan satu ruang perpustakaan yang harus dikelola dengan baik. Berdasarkan observasi awal, ditemukan perbedaan antara laporan RKAS dan rekapitulasi realisasi penggunaan dana BOS. Komponen pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan tercantum dalam RKAS, tetapi tidak muncul dalam rekapitulasi realisasi. Selain itu, pengembangan perpustakaan belum berjalan maksimal dan terjadi keterlambatan pembayaran honor guru honorer. Fenomena ini menunjukkan adanya celah dalam perencanaan dan pertanggungjawaban yang perlu ditelusuri lebih dalam.

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pengelolaan keuangan dana BOS di SMP Negeri 25 Medan, mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat. Dengan memahami keempat tahap tersebut, diharapkan dapat ditemukan titik lemah yang perlu diperbaiki dan praktik baik yang perlu dipertahankan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah menggambarkan dan menganalisis fenomena pengelolaan dana BOS secara mendalam serta mengukur pengaruhnya. Data primer diperoleh melalui wawancara semi terstruktur kepada kepala sekolah, bendahara BOS, guru, dan komite sekolah. Data sekunder dikumpulkan dari dokumen RKAS, laporan realisasi penggunaan dana BOS, dan dokumen pendukung lainnya. Teknik analisis data mengikuti model Miles dan Huberman, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi dilakukan dengan memilah informasi yang relevan, menyederhanakan, dan mengelompokkan sesuai fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi dan tabel agar pola dan hubungan antar informasi lebih mudah dipahami. Penarikan kesimpulan dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian, dengan verifikasi melalui triangulasi sumber dan teknik.

III. HASIL PENELITIAN

SMP Negeri 25 Medan berdiri pada tahun 1983 dengan nama awal SMP Negeri 23. Pada tahun 1998, namanya berubah menjadi SMP Negeri 25 Medan. Sekolah ini dibangun dari dana Pelita III Tahun ke IV dan diresmikan pada 13 Februari 1984. Sejak tahun 2022, sekolah dipimpin oleh Ibu Arfiliana, S.Pd., M.Pd. Lokasinya berada di Jalan Rawe II Nomor 10, Tangkahan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara. Sekolah ini melayani peserta didik tanpa memandang golongan, suku, dan agama, dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai serta biaya pendidikan gratis. Visi sekolah adalah bersama membantu pendidikan untuk semua yang berkualitas dan berdaya saing. Misinya meliputi peningkatan akses dan mutu pendidikan, pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas, peningkatan profesionalisme tenaga pendidik, serta mewujudkan sarana dan prasarana pendidikan.

Proses perencanaan dana BOS di SMP Negeri 25 Medan diawali dengan penyusunan RKAS. Tim anggaran yang terdiri dari kepala sekolah dan tata usaha mengumpulkan kebutuhan dari masing masing sumber daya manusia, lalu menyusun konsep pemasukan dan pengeluaran. Konsep tersebut dibahas dalam rapat bersama komite sekolah untuk memperoleh pertimbangan mengenai skala prioritas. Rapat juga melibatkan guru untuk membicarakan kebutuhan pembelajaran dan perlengkapan sekolah. Perencanaan mengacu pada delapan standar pendidikan nasional, yaitu pengembangan kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, serta pengembangan dan implementasi sistem penilaian. Kedelapan standar tersebut dijabarkan sesuai kebutuhan dan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Namun, hasil wawancara mengungkap bahwa sosialisasi dari dinas pendidikan mengenai dana BOS dirasa kurang. Akibatnya, pihak sekolah kadang kesulitan memahami perubahan regulasi dan menyusun RKAS secara tepat. Persoalan ini diperparah oleh pergantian bendahara yang terjadi beberapa kali antara tahun 2020 dan 2022, sehingga kontinuitas penyusunan anggaran terganggu.

Pelaksanaan dana BOS di SMP Negeri 25 Medan mengikuti pola penyaluran yang ditetapkan pemerintah. Pada tahun 2021, dana diterima dalam tiga tahap: tahap pertama sebesar 30 persen (Januari sampai Maret), tahap kedua 40 persen (April sampai Agustus), dan tahap ketiga 30 persen (September sampai Desember). Pada tahun 2022, penyaluran berubah menjadi dua tahap: tahap pertama 70 persen (Januari sampai Juni) dan tahap kedua 30 persen (Juli sampai Desember). Perubahan pola ini menuntut sekolah menyesuaikan ritme belanja dan pelaporan. Data penerimaan dan pengeluaran menunjukkan dinamika yang perlu dicermati. Pada tahun pelajaran 2020/2021, tahap pertama diterima Rp245.616.000 dengan pengeluaran Rp187.973.102; tahap kedua diterima Rp327.488.000 dengan pengeluaran Rp385.002.724; dan tahap ketiga diterima Rp242.256.000 dengan pengeluaran Rp242.182.057. Pada tahun pelajaran 2021/2022, tahap pertama diterima Rp564.979.288 dengan pengeluaran Rp477.197.349, dan tahap kedua diterima Rp242.256.000 dengan pengeluaran Rp329.701.841. Terlihat bahwa pada beberapa tahap, pengeluaran melebihi penerimaan, yang mengindikasikan adanya penggunaan saldo dari tahap sebelumnya atau penyesuaian anggaran.

Realisasi penggunaan dana BOS mencakup berbagai komponen. Pada tahun 2020/2021, dana digunakan untuk pengembangan kompetensi lulusan (Rp34.515.000), pengembangan standar proses (Rp120.102.800), pengembangan sarana dan prasarana (Rp239.491.944), dan pengembangan standar pembiayaan (Rp421.048.139), dengan total Rp815.157.883. Pada tahun 2021/2022, realisasi meliputi pengembangan standar isi (Rp2.255.000), standar proses (Rp2.400.000), sarana dan prasarana (Rp386.285.261), standar pengelolaan (Rp112.838.929), standar pembiayaan (Rp297.900.000), dan implementasi sistem penilaian (Rp5.220.000), dengan total Rp806.899.190. Secara umum, pelaksanaan penggunaan dana BOS sudah mengacu pada petunjuk teknis tahun 2022. Dana digunakan untuk pembelian alat tulis, penggandaan soal, peralatan pendidikan, bahan habis pakai, kegiatan ekstrakurikuler, pemeliharaan ringan sarana dan prasarana, langganan daya dan jasa, penyusunan dan pelaporan, peningkatan mutu, pengadaan buku teks, penerimaan siswa baru, pembayaran honor guru honorer, serta perawatan perangkat komputer. Namun, keterlambatan penyaluran dana sering terjadi. Tahap kedua yang seharusnya cair pada April kadang baru diterima pada Juni, bahkan ada kalanya dua tahap dicairkan sekaligus pada tahap ketiga. Kondisi ini memaksa sekolah menunda beberapa kegiatan dan menyesuaikan prioritas belanja.

Pengawasan dana BOS di SMP Negeri 25 Medan melibatkan kepala sekolah, bendahara, dan komite sekolah. Pengambilan dana dilakukan melalui bank penyalur dengan menggunakan cek giro yang ditandatangani oleh kepala sekolah dan bendahara, disertai bukti KTP atau SIM. Dana tidak serta merta diambil seluruhnya, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan yang akan segera dilaksanakan, dengan menyisakan saldo minimum sesuai ketentuan. Kepala sekolah mengaku selalu mengawasi pembelanjaan yang dilakukan bendahara. Pengawasan juga dilakukan melalui aplikasi ARKAS dan pemeriksaan bukti pembelian. Komite sekolah turut dilibatkan dalam rapat rutin untuk mengevaluasi realisasi anggaran. Namun, pengawasan masih menyisakan celah. Salah satunya terkait pemberian honor guru honorer yang sering tertunda. Keterlambatan ini disebabkan oleh keterlambatan dana dari dinas pendidikan, tetapi dampaknya bagi guru honorer cukup serius karena honor merupakan sumber penghasilan utama mereka. Dari perspektif pengawasan internal,

sekolah belum membentuk tim belanja barang yang terpisah dari tim penerima barang. Berdasarkan wawancara, semua urusan belanja dilakukan oleh bendahara, kepala sekolah, dan guru yang membantu.

Pertanggungjawaban dana BOS di SMP Negeri 25 Medan dilakukan melalui laporan yang disusun setiap akhir periode tahap dan akhir semester. Laporan disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kota Medan, Dinas Pusat, dan komite sekolah. Sejak diberlakukannya sistem pelaporan daring, sekolah menggunakan aplikasi ARKAS untuk menyusun laporan. Bendahara BOS dan pembantu bendahara bertanggung jawab membuat laporan, dengan supervisi dari kepala sekolah. Secara prosedural, laporan sudah memenuhi kriteria. Sekolah membuat laporan setiap tahap, mencatat realisasi penggunaan, dan menyerahkan dokumen kepada Tim BOS Kota Medan untuk diperiksa. RKAS ditandatangani oleh kepala sekolah dan disimpan di sekolah untuk diperlihatkan kepada pengawas. Namun, keterlambatan penyaluran dana sering membuat penyusunan laporan tertunda. Bendahara terpaksa merevisi atau menunda laporan pertanggungjawaban hingga dana benar benar terealisasi. Akibatnya, laporan pertanggungjawaban tidak selalu selesai tepat waktu.

IV. PEMBAHASAN

Pemberian sosialisasi yang memadai dari dinas pendidikan menjadi katalisator utama dalam memacu kualitas perencanaan keuangan sekolah. Ketika pemahaman regulasi dan teknis penyusunan RKAS dikuasai dengan baik, pengelola dana di tingkat sekolah akan mampu menerjemahkan kebijakan pusat ke dalam rencana kegiatan yang aplikatif. Temuan ini memperkuat bukti adanya pengaruh signifikan pemahaman akuntansi terhadap performa pengelolaan keuangan yang baik. Secara spesifik, aspek pemahaman teknis seperti penyusunan laporan dan penyesuaian anggaran menjadi faktor penentu untuk mendapatkan kualitas perencanaan yang baik di SMP Negeri 25 Medan. Sari dan Harianto (2022) menyatakan bahwa pemahaman akuntansi yang memadai diperlukan agar pengelola mampu menyusun laporan dan anggaran secara akurat. Dalam konteks sekolah, pemahaman tersebut tidak hanya soal teknis pencatatan, tetapi juga kemampuan menerjemahkan regulasi ke dalam rencana kegiatan. Keterbatasan sosialisasi membuat transfer pengetahuan dari dinas ke sekolah tidak berjalan optimal, sementara pergantian bendahara menghilangkan pengalaman yang sudah terbangun.

Meskipun secara prosedural perencanaan sudah melibatkan unsur yang seharusnya, kelemahan pada kapasitas dan kontinuitas personel tetap menjadi pekerjaan rumah. Kepala sekolah, guru, dan komite sekolah duduk bersama membahas kebutuhan. Waktu penyusunan RKAS juga dilakukan pada awal tahun anggaran, dan penggunaan skala prioritas sudah diterapkan. Namun, hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa ketiadaan forum atau prosedur bukanlah masalah utama. Persoalannya lebih pada hilangnya pengetahuan dan pengalaman ketika bendahara berganti. Oleh karena itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan sangat diperlukan untuk mendorong kinerja pengelolaan ke level yang lebih baik.

Keterlambatan penyaluran dana bukanlah persoalan baru dalam pengelolaan BOS. Sjioen dan Ludji (2020) menemukan bahwa efektivitas pengelolaan BOS di salah satu sekolah dasar di Kupang kurang optimal karena penyaluran yang tidak sesuai jadwal.

Temuan serupa juga dilaporkan Saisarani dan Sinarwati (2021) di SMA Negeri 4 Singaraja, di mana keterlambatan pencairan menjadi kendala utama. Dengan demikian, persoalan yang dihadapi SMP Negeri 25 Medan merupakan bagian dari masalah struktural yang lebih luas, bukan semata mata kelemahan internal sekolah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pelaksanaan dan penyaluran dana berpengaruh signifikan secara bersama sama atau simultan terhadap efektivitas proses belajar mengajar. Melalui analisis data diperoleh gambaran bahwa ketika dana cair tepat waktu, realisasi kegiatan belajar mengajar dapat berjalan sesuai rencana. Artinya, kelancaran arus kas sekolah sangat menentukan tercapainya target operasional pendidikan.

Pengawasan tidak sekadar bertumpu pada pemeriksaan dokumen sesekali, melainkan juga mencakup aspek sistematis seperti pemisahan fungsi dan pemanfaatan teknologi. Ketika sekolah berhasil menyelaraskan ekspektasi regulasi dengan praktik riil di lapangan, akan tercipta sebuah ekosistem kerja yang produktif, yang pada gilirannya mampu mengeskalasi akuntabilitas pengelolaan dana. Fahmi et al. (2023) menyoroti bahwa data analitik audit dapat membantu mengidentifikasi pola transaksi yang tidak wajar. Meskipun sekolah belum memanfaatkan teknologi audit semacam itu, prinsipnya relevan: pengawasan tidak cukup hanya mengandalkan pemeriksaan dokumen, tetapi perlu ada mekanisme yang sistematis untuk mendeteksi anomali. Di sisi lain, Januri (2021) mengingatkan bahwa lemahnya pengawasan dapat membuka ruang bagi praktik manajemen laba. Dalam konteks dana BOS, manajemen laba dapat diartikan sebagai upaya menyusun laporan sedemikian rupa agar tampak sesuai, padahal realisasinya berbeda. Oleh karena itu, pengawasan yang hanya formalitas tidak akan cukup.

Pemberian kompensasi berupa honor yang tepat waktu dan penciptaan sistem kontrol yang baik merupakan fondasi utama dalam memacu akselerasi produktivitas guru. Ketika sekolah mampu mengintegrasikan skema pengawasan internal yang adil dengan iklim kerja yang suportif, guru cenderung mengalami peningkatan motivasi intrinsik yang berdampak langsung pada optimalisasi output kerja mereka. Sinergi antara penghargaan materiil yang layak dan pemenuhan ekspektasi psikologis di tempat kerja menciptakan rasa kepemilikan yang kuat, sehingga individu merasa terdorong untuk memberikan kontribusi terbaik melampaui standar minimal yang ditetapkan. Hafsah et al. (2023) menemukan bahwa kecerdasan emosional dan perilaku belajar berpengaruh terhadap tingkat pemahaman akuntansi. Dalam konteks pengelolaan BOS, pemahaman akuntansi yang baik membantu bendahara dan kepala sekolah mengambil keputusan yang tepat, terutama saat menghadapi keterlambatan atau perubahan regulasi. Hanum dan Faradila (2023) juga menekankan pentingnya perencanaan yang matang dalam pengelolaan keuangan, terutama terkait kepatuhan terhadap regulasi perpajakan. Prinsip kepatuhan ini relevan dengan pengelolaan BOS yang harus mengikuti petunjuk teknis secara konsisten.

Pertanggungjawaban dana publik harus diwujudkan melalui laporan yang tepat waktu dan mudah diakses. Keterlambatan pelaporan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat. Hal serupa berlaku untuk dana BOS: ketika laporan tertunda, publik kehilangan gambaran tentang penggunaan dana, dan potensi penyimpangan menjadi lebih sulit dideteksi. Sari (2021) menekankan bahwa akuntabilitas dan transparansi merupakan fondasi penting dalam pengelolaan dana publik, termasuk dana desa. Prinsip serupa berlaku untuk

dana BOS, karena keduanya bersumber dari anggaran pemerintah dan harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, upaya mempercepat pelaporan bukan sekadar soal administrasi, tetapi bagian dari membangun kepercayaan publik. Hal ini sejalan dengan temuan Lestari et al. (2021) yang menyoroti pentingnya tata kelola dan kebijakan yang tepat dalam menjaga stabilitas keuangan organisasi. Pasaribu dan Harahap (2023) juga menegaskan bahwa pertumbuhan dan solvabilitas memerlukan perhatian serius agar tidak menimbulkan opini audit yang merugikan. Dalam konteks sekolah, stabilitas keuangan dan kepatuhan pelaporan menjadi kunci untuk mempertahankan kepercayaan pemerintah dan masyarakat.

Secara keseluruhan, faktor pendukung utama dalam pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 25 Medan adalah keterlibatan seluruh pemangku kepentingan sekolah. Kepala sekolah, guru, staf, dan komite sekolah terlibat dalam perencanaan realisasi anggaran. Dukungan dewan guru dan kepala sekolah memperlancar setiap tahap pengelolaan. Tanpa dukungan tersebut, realisasi program tidak akan berjalan sesuai rencana. Faktor penghambat yang paling menonjol adalah keterlambatan penyaluran dana dari pusat ke sekolah. Keterlambatan ini berdampak pada penundaan kegiatan, penundaan pembayaran honor, dan keterlambatan penyusunan laporan pertanggungjawaban. Penghambat kedua adalah kurangnya sosialisasi dari dinas pendidikan mengenai regulasi dan petunjuk teknis dana BOS. Akibatnya, sekolah kadang melakukan kesalahan dalam penyusunan RKAS atau memahami komponen yang boleh dibiayai. Penghambat ketiga adalah pergantian bendahara yang menyebabkan hilangnya pengetahuan dan pengalaman, sehingga proses administrasi menjadi kurang stabil.

Sekolah telah melakukan beberapa upaya untuk menghadapi hambatan. Ketika dana belum cair, kepala sekolah dan bendahara memprioritaskan kebutuhan yang paling mendesak, seperti buku pelajaran, alat tulis kantor, dan gaji guru. Kegiatan yang sifatnya tidak mendesak, seperti pemangkasan pohon atau perbaikan ringan, ditunda hingga dana tersedia. Strategi ini memungkinkan proses belajar mengajar tetap berjalan meskipun dengan keterbatasan. Upaya lain adalah memperkuat koordinasi internal. Kepala sekolah, bendahara, dan guru berkomunikasi secara rutin untuk memantau kebutuhan dan menyesuaikan rencana belanja dengan dana yang tersedia. Komite sekolah juga dilibatkan dalam rapat evaluasi, sehingga keputusan yang diambil mempertimbangkan berbagai kepentingan. Meskipun belum ada solusi struktural terhadap keterlambatan penyaluran, koordinasi internal membantu sekolah bertahan dan tetap menjalankan fungsi operasionalnya. Barsani et al. (2018) mencatat bahwa peningkatan anggaran pada sub pembiayaan yang berkaitan dengan fasilitas sekolah sangat membantu dalam meningkatkan kualitas kelengkapan fasilitas. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat hambatan, alokasi dana yang tepat sasaran akan tetap memberikan dampak positif bagi sekolah. Izzah dan Yanto (2018) juga menekankan bahwa proses pengelolaan keuangan yang diawali dengan penyusunan RKAS dan RAB yang baik akan memudahkan pelaksanaan dan pembukuan. Solikhatun (2016) menambahkan bahwa prinsip swakelola, partisipatif, transparan, dan akuntabel harus dilaksanakan dengan baik agar pengelolaan dana BOS dapat berjalan optimal.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tentang hasil analisis yang telah dilakukan, maka diketahui jawaban dari rumusan masalah penelitian. Pengelolaan keuangan dana BOS di SMP Negeri 25 Medan menunjukkan capaian yang tidak merata di setiap tahap. Perencanaan belum maksimal karena sosialisasi yang kurang dan pergantian bendahara, meskipun prosedur penyusunan RKAS sudah melibatkan pemangku kepentingan. Pelaksanaan sudah mengikuti petunjuk teknis, tetapi keterlambatan penyaluran dana membuat realisasi tidak selalu tepat waktu. Pengawasan melemah pada aspek pembayaran honor guru honorer dan belum adanya pemisahan fungsi antara pemegang keuangan dan petugas belanja barang. Pertanggungjawaban sudah memenuhi kriteria karena laporan dibuat setiap tahap dan disampaikan melalui aplikasi ARKAS, meskipun sering tertunda akibat keterlambatan dana. Faktor pendukung utama adalah keterlibatan seluruh pemangku kepentingan sekolah, sedangkan faktor penghambat meliputi keterlambatan penyaluran, minimnya sosialisasi, dan ketidakstabilan personel bendahara. Upaya yang dilakukan sekolah adalah memprioritaskan kebutuhan proses belajar mengajar dan gaji guru, serta memperkuat koordinasi internal. Untuk perbaikan ke depan, diperlukan sosialisasi yang lebih intensif dari dinas pendidikan, stabilitas personel pengelola, dan penguatan sistem pengawasan internal agar pengelolaan dana BOS semakin akuntabel dan transparan.

VI. REFERENSI

Barsani, B., Muchran, B., & Jaya, A. (2018). Analisis Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Meningkatkan Kualitas Kelengkapan Fasilitas Sekolah Di SMP Negeri 3 Makassar. Jurnal Profitability Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, 2(2).

Dahrani, D., Saragih, F., & Ritonga, P. (2022). Model Pengelolaan Keuangan Berbasis Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan: Studi pada UMKM di Kota Binjai. Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi, 6(2), 1509 sampai 1518.

Fahmi, M., Harahap, R. U., & Rozi, F. (2023). Data Analitik Audit: Kontribusi Dan Hambatan Pada Praktik Audit. JRAM (Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma), 10(2), 32 sampai 36.

Gunawan, A., Pirari, W. S., & Sari, M. (2020). Pengaruh Literasi Keuangan dan Gaya Hidup Terhadap Pengelolaan Keuangan Mahasiswa Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Hukum, 4(2), 23 sampai 35.

Hafsah, H., Hanum, Z., Saragih, F., & Ningsih, R. W. (2023). Pengaruh Kecerdasan Emosional Dan Perilaku Belajar Terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi Pada Mahasiswa Akuntansi FEB UMSU. Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi, 7(1), 312 sampai 321.

Hanum, Z., & Faradila, J. (2023). Effect of Tax Planning on Profit Management in Registered Food and Beverage Sub Sector Manufacturing Companies on the Indonesia Stock Exchange. Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi, 7(1), 479 sampai 487.

Izzah, A. W., & Yanto. (2018). Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Studi Kasus Pada SMK Nurul Hikmah Tengguli Bangsri Jepara). Jurnal Rekognisi Akuntansi, 2(2).

Januri, J. (2021). Accrual earnings management: Evidence from IPOs firms in Indonesia. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, 25(2), 209 sampai 218.

Lestari, S. P., Dahrani, D., Purnama, N. I., & Jufrizen, J. (2021). Model Determinan Kebijakan Hutang dan Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Farmasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen, 4(2), 245 sampai 256.

Pasaribu, M. H., & Harahap, R. U. (2023). Pengaruh Debt Default, Pertumbuhan Perusahaan, dan Solvabilitas terhadap Opini Audit Going Concern. Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS), 5(1), 185 sampai 194.

Saisarani, K. G. P., & Sinarwati, N. K. (2021). Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA Negeri 4 Singaraja Tahun 2020. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, 11(2).

Sari, E. N. (2021). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Lobu Rampah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara. Repository UMSU.

Sari, E. N., & Harianto, A. (2022). Pengaruh Fasilitas Belajar Dan Kapasitas Guru Terhadap Pemahaman Akuntansi Dengan Ilc Sebagai Variabel Moderasi Pada Smk Akuntansi Bagian Medan Utara. JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis), 8(2), 185 sampai 196.

Sjioen, A. E., & Ludji, S. R. (2020). Analisis Efektivitas Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Dasar Negeri Bonipoi 2 Kota Kupang. iE: Jurnal Inspirasi Ekonomi, 2(3).

Solikhatun, I. (2016). Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Studi Pada SMK Negeri 1 Yogyakarta). Kajian Pendidikan Akuntansi Indonesia, 5(5).

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah.